

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Motivasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan kedalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik yang merupakan wujud kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Negara Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang “ dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat,

hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan dan lain-lain.

Dalam Pemilihan Umum baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya Pemilihan Umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya Pemilu digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi.

Pemilihan Umum serentak 17 April 2019 meninggalkan beberapa catatan penting. Pemilu kali ini dianggap yang terberat dalam sejarah demokrasi di Indonesia dalam menentukan pemimpin terkhususnya di Kota Medan mengenai proses Pemilu, apalagi Pemilu di Tahun 2019 yang diikuti pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dilakukan secara bersamaan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat Minangkabau dalam politik adalah kegiatan untuk turut serta aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih Calon Legislatif DPRD Kota Medan.

Masyarakat Minangkabau di Lingkungan 20 Kelurahan Binjai dalam menentukan hak politiknya tidak didasari oleh identitas ataupun kesamaan semata melainkan kesadaran politik mereka.. Motivasi politik masyarakat Minangkabau sangat berbeda-beda setiap orangnya, ada yang menganggap bahwa motivasi

politik mereka dilihat dari adanya faktor kesamaan agama, adanya timbal balik yang diberikan oleh para Calon Legislatif, adanya perbuatan yang sudah dilakukan untuk wilayah tempat tinggal mereka. Hal ini membuat partisipasi politik mereka dilihat dari adanya motivasi politik mereka yang berbeda-beda sehingga masyarakat dalam menentukan hak pilihnya sesuai dengan pendapat dan sudah dianggap baik bagi dirinya.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran terhadap Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik, antara lain sebagai berikut :

1. Pemilihan Legislatif sebagai ajang untuk memilih perwakilan rakyat, sebaiknya jabatan tersebut dimanfaatkan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Adanya kesadaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menjalankan tugas, hak, dan kewajibanya.
2. Pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat lainnya harus turun untuk memberikan pencerahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kedsaran politik masyarakat sehingga bermuara pada keikutsertaan dalam kegiatan Pemilu.
3. Diharapkan juga agar pengawasan dalam Pemilihan Umum terkhususnya Pemilihan Legislatif DPRD Kota Medan lebih

diperketat agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahan yang tidak diinginkan

4. Peneliti mengharapkan agar perwakilan dari Masyarakat Minangkabau di Kota Medan dapat Menduduki Kursi DPRD Kota Medan
5. Peneliti juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini, semoga kritik dan saran membangun dapat menjadi penyemangat untuk memperbaiki di waktu yang akan datang.